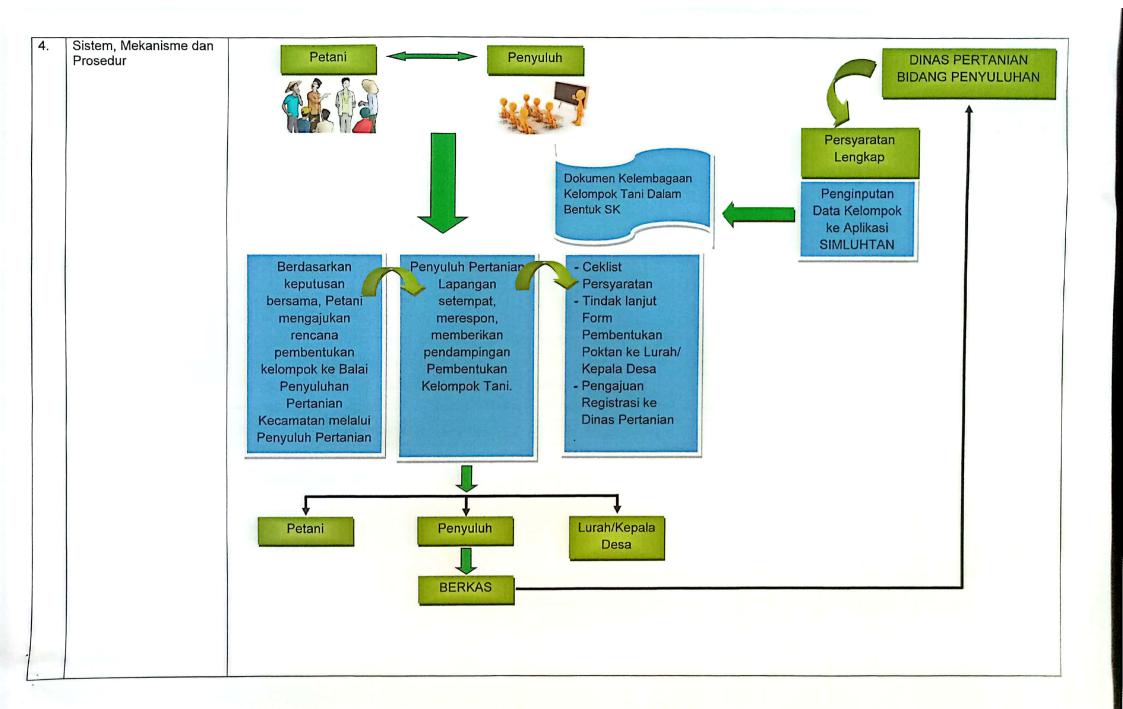
•				
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS PERTANIAN	NOMOR SOP TGL.PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH  NAMA SOP KUALIFIKASI PELA	: 18.28/050/4090/2025 : 9. Oktober 2025 : 10 Oktober 2025 : 13 Oktober 2025 : KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  WILLIAM BEDAGAI  Prosedur Pembentukan Kelompok Tani		
DASAR HUKUM:				
<ol> <li>Undang – Undang No. 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan</li> <li>Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani</li> <li>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai</li> </ol>	kelembagaan k 2. Mengetahui tug Kelompok Tani 3. Mengetahui tug sumber daya ke 4. Pendidikan : SL	gas dan fungsi organisasi Kelembagaan gas dan fungsi mekanisme pengembangan elompok tani LTA / D3 / D4 / S1 / S2		
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN			
Eksternal	<ol> <li>Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran         <ul> <li>Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur Latihan dan Kunjungan Penyuluh (Pendamping)</li> <li>Monitoring, evaluasi dan pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani melalui system penyuluh yang didukung dengan anggaran</li> <li>Rencana Kerja Penyuluh</li> </ul> </li> <li>Term of Refference</li> <li>Komputer/Printer/Scanner</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>			
PERINGATAN	PENCATATAN DAI			
Kalau kegiatan ini tidak dilakukan maka penyuluh tidak melaksanakan TUPOKSI nya sehingga dilakukan peringatan secara lisan sebanyak 3 kali, peringatan	- Disimpan seba	gai data elektronik dan manual		

tertulis, dan dilakukan sanksi

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No. 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
		2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani
		3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
2.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00 – 16.00 WIB (Istirahat Pukul 12.00 – 13.00 WIB)
		Hari Jum'at Pukul 08.00 – 15.30 WIB (Istirahat Pukul 12.00 – 13.00 WIB)
		Hari Sabtu s/d Minggu (Libur)
3.	Persyaratan	Persyaratan Pembentukan Kelompok Tani :
		1. Penyuluh Pertanian Lapangan mengidentifikasi melalui pengumpulan data/informasi dari petani.
		Petani memiliki kegiatan usaha tani sebagai mata pencaharian utama.
		3. Mempunyai pandangan/kepentingan/tujuan yang sama dalam berusaha tani.
		4. Memiliki kesamaan dalam jenis usaha tani.
		5. Memiliki anggota minimal 20 orang.
		6. Musyawarah pembentukan kelembagaan petani dan ditanda tangani oleh pengurus dan diketahui oleh Koordinator Balai Penyuluhan
		Pertanian serta diketahui juga oleh Kepala Desa/Lurah.
		7. Melampirkan AD/ART Kelembagaan Kelompok Tani
		8. Daftar hadir rapat pembentukan Kelompok.
		9. Melampirkan data potensi Anggota Kelompok.
		10. Melampirkan Fotokopi KTP pengurus dan Anggota Kelompok.
		11. Penginputan data Kelompok ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).



5.	Durasi Waktu Pekerjaan	1 – 2 Hari Kerja						
6.	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani						
7.	Sarana, Prasarana dan	ertas HVS, Kertas Concorde, Foto Copy, Printer, Alat Transportasi ke Lapangan						
	atau Fasilitas Pelayanan							
8.	Kopetensi dan Jumlah	Memiliki kemampuan pendampingan dan pembinaan kelembagaan kelompok tani						
	Pelaksana	2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi kelompok tani						
		3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengembangan sumberdaya kelompok tani						
		4. Memahami cara kerja Program Word dan Excel						
		5. Pendidikan: SLTA / D3 / D4 / S1						
		6. Pelaksana 1 (satu) rang Staf / JFU						
9.	Pengawasan Internal	Menerima data atau konsultasi petani yang akan membentuk Kelembagaan Kelompok Tani						
		2. Melakukan Crosscheck data						
		3. Melakukan survey lapangan						
		4. Melakukan pendampingan pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani						
10.	Penanganan Pengaduan	Pejabat Fungsional yang Menangani Kelembagaan, Kabid Penyuluhan dan Kepala Dinas Pertanian						
11.	Jaminan Pelayanan	Pendampingan dan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani						
		Melakukan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani dan penginputan ke Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian)						
12.	Output Pelayanan	Surat Keterangan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani						

Sei Rampah, 13 Oktober 2025 ERALIA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DECYSISKA NEAR, SP, MM Rendsing OK 1 (IV/b) NIP. 19780208 200502 1 001

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

		Pelaksana			Mutu Baku				
No	Aktivitas	Pemohon (Petani)	PPL (WKPP)	Kasi Kelembagaan	Bidang Penyuluhan	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Berdasarkan kesepakatan bersama petani, mengajukan pembentukan Kelompok tani ke DKPP melalui Penyuluh setempat.	Mulai					Penyuluh Pertanian Lapangan mengidentifikasi melalui pengumpulan data/informasi dari petani.     Petani memiliki kegiatan usaha tani sebagai mata pencaharian utama.	60 menit	Berkas
2.	Penyuluh Pertanian Lapangan Setempat (WKPP) merespon dan memberikan pendampingan serta menyiapkan formulir pembentukan Kelompok Tani.					<ol> <li>Mempunyai pandangan/kepentingan/tujuan yang sama dalam berusaha tani.</li> <li>Memiliki kesamaan dalam jenis usaha tani.</li> <li>Memiliki anggota minimal 20 orang.</li> <li>Musyawarah pembentukan kelembagaan petani dan ditanda tangani oleh pengurus dan diketahui oleh Koordinator Balai</li> </ol>	60 Menit	Berkas	
3.	Penyuluh Bersama Petani melakukan pemberkasan persyaratan administrasi pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani						Penyuluhan Pertanian serta diketahui juga oleh Kepala Desa/Lurah.  7. Melampirkan AD/ART Kelompok.  8. Daftar hadir rapat pembentukan Kelompok.  9. Melampirkan data potensi Anggota Kelompok.  10. Melampirkan Fotokopi KTP pengurus dan Anggota Kelompok.  11. Penginputan data Kelompok ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).	90 Menit	Berkas
4.	Setelah lengkap, berkas dibawa ke kantor Lurah/Desa untuk diketahui oleh Lurah/Desa setempat.		<b>*</b>					60 Menit	Berkas
5.	Berkas dibawa ke Dinas Pertanian (Bidang Penyuluhan)	Tidak		<b>→</b>	Y			30 Menit	Berkas
6.	Pemberkasan (Lengkap) dan Penginputan ke SIMLUHTAN	Lengkap		-	-			60 Menit	Berkas
7.	Surat Keterangan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani	Selesai							Surat Keputusan